

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, pemerintahan merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam perusahaan. Dengan kekuasaan yang dimiliki, pemerintah memiliki legitimasi dalam pengendalian dan pengawasan supaya program-program perusahaan dapat menjadi salah satu penyokong pembangunan dan keberlanjutan dalam hal ekonomi dan lingkungan. Pemerintah adalah regulator yang dapat memfasilitasi sekaligus membatasi jalannya roda perusahaan. Disamping itu, selain memiliki kewajiban untuk tunduk pada pemerintah, perusahaan memiliki tujuan utama yang mana merupakan menghasilkan profit sebesar-besarnya.

Namun, dengan tujuan utama tersebut menjadikan perusahaan abai dengan dampak lingkungan dan sosial dari setiap kegiatan yang dimiliki ataupun dilakukan oleh perusahaan, sehingga ketika ditimbulkan kegiatan yang dilaksanakan perusahaan, kebanyakan perusahaan akan menunjukkan maksimalisasi keuntungan yang di dapat dan mengabaikan dampak yang terjadi pada masyarakat, lingkungan dan pemerintahan.¹ Hal tersebut menjadikan perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap setiap dampak yang ditimbulkan. Tanggung jawab tersebut disebutkan pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “Perseroan yang menjalankan usahanya dibidang dan/atau

¹ Ainunnisa Islami, ‘Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PDAM Tirta Kampar Kepada Masyarakat Kelurahan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar’, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2022, hlm. 1.

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab, sosial dan lingkungan”.

Dalam menjalankan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan dan sosial, perusahaan perlu berkolaborasi dengan pemerintahan dalam menjalankan setiap program-program yang dijalani oleh perusahaan. Salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintahan dan perusahaan adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/*Corporate Social Responsibility*.

Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab sosial untuk masyarakat beserta lingkungan selain tanggung jawab ekonomis, atau komitmen dalam perusahaan untuk berkontribusi secara ekonomi berkelanjutan dengan melihat tanggung jawab perusahaan dan memfokuskan pada keseimbangan perhatian pada ekonomi, sosial dan lingkungan.² Salah satu perseroan terbatas yang menjalani *CSR* adalah Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN) IV.

PTPN IV Regional 4 merupakan perusahaan yang masuk di dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi dalam pengelolaan perkebunan pada regional Jambi dan Sumatera Barat. Sebagai badan usaha yang berdiri sejak tahun 1996 yang telah memaksimalkan keuntungan bisnisnya dalam membantu pendapatan daerah Jambi serta Sumatera Barat tentu perlu menjalankan tanggung jawab sosial nya terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemerintahan. Sebagaimana hal tersebut, program TJSL PTPN IV Regional 4 menggunakan konsep *Creating Share Value* atau disingkat sebagai *CSV* yang memiliki

² Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

karakteristik untuk membagikan manfaat dan nilai dari TJSL kepada masyarakat dan perusahaan. Dalam tahun 2023, terdapat beberapa bukti penyaluran TJSL pada PTPN IV melalui media cetak online yaitu :

Tabel 1.1 Penyebaran TJSL PTPN IV Regional 4 di Kota Jambi

No	Bentuk TJSL	Ringkasan Berita
1	Pembangunan	Menurut warga RT 5 Kenali Besar, PTPN IV Regional 4 telah membangun jembatan penghubung kawasan pemukiman dan sarana olahraga sebesar 85 juta. Pembangunan ini berdampak positif kepada masyarakat RT 5 Kenali Besar. ³ Selain itu, PTPN IV Regional 4 juga memberikan bantuan perluasan masjid Al-Ikhlas di RT 33 Kelurahan Kenali Asam dengan bantuan dana sebesar 10 juta. ⁴
2	Pendidikan	Selain memberikan bantuan dalam pembangunan, PTPN IV Regional 4 turut memberikan bantuan pendidikan. Salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan dari PTPN IV Regional 4 adalah SMK 3 Jambi dengan bantuan dana sebesar 10 juta yang diserahkan langsung kepada kepala sekolah itu sendiri, Bantuan ini diharapkan dapat membantu dalam membangun sarana olahraga dengan standar pada kebutuhan sekolah itu sendiri. ⁵

³ METROJAMBI.COM, PTPN VI Bangun Jembatan Menuju Perumahan Warga di Kenali Besar, <https://www.metrojambi.com/metro/1355770/PTPN-VI-Bangun-Jembatan-Menuju-Perumahan-Warga-di-Kenali-Besar>, Diakses 4 Maret 2024.

⁴ JAMBIONE.COM, PTPN VI Bantu Perluasan Masjid, <https://www.jambione.com/megapolitan/1362686009/PTPN-VI-Bantu-Perluasan-Masjid>, Diakses 4 Maret 2024

⁵ Indonews.id, Perbanyak Kegiatan Positif Siswa, PTPN VI Bantu SMK 3 Jambi, <https://indonews.id/artikel/329378/Perbanyak-Kegiatan-Positif-Siswa-PTPN-VI-Bantu-SMK-3-Jambi/>, Diakses 4 Maret 2024.

3	UMKM/Wirausaha	Selanjutnya, PTPN IV Regional 4 memberikan fasilitas berupa 5 unit booth kepada mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah supaya membantu mahasiswa mengembangkan jiwa usaha. ⁶ Kemudian, PTPN IV Regional 4 juga memberikan bantuan kepada 6 Panti Asuhan yang berada di Kota Jambi. Bantuan tersebut berupa 6 unit booth <i>container</i> , dengan total dana yang digunakan adalah 48 juta. ⁷
---	----------------	--

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari berbagai sumber, 2024

Dari tabel yang ada diatas, dapat diketahui bahwa PTPN IV Regional 4 bergerak dalam memberikan bantuan TJSL nya di lingkungan Kota Jambi. Namun, dengan potensi serta banyaknya perusahaan yang telah ataupun baru menjalin kolaborasi dengan pemerintah dalam menyalurkan TJSL, PTPN IV Regional 4 perlu melakukan kolaborasi dengan pemerintah dalam menyalurkan TJSL, dalam hal ini bisa dilakukan dalam menyalurkan bantuan TJSL dalam kriteria UMKM serta pembangunan. Kedua kriteria tersebut dapat dilakukan kolaborasi dengan pemerintah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dari setiap kegiatan TJSL.

Dalam penelitian ini, untuk menghindari adanya kesamaan penelitian yang berulang dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka dipaparkan tiga

⁶ METROJAMBI.COM, PTPN VI Asah Kemampuan Wirausaha Mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah, <https://www.metrojambi.com/metro/133087629/ptpn-vi-asah-kemampuan-wirausaha-mahasiswa-universitas-nurdin-hamzah>, Diakses 4 Maret 2024.

⁷ Tribun Jambi.com, PTPN VI Menciptakan Anak Panti Asuhan Jadi Pengusaha, <https://jambi.tribunnews.com/2022/11/22/ptpn-vi-ciptakan-anak-panti-asuhan-jadi-pengusaha>, Diakses 4 Maret 2024.

penelitian terdahulu yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini dalam berbentuk tabel. Pembahasan ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul (Nama, Sumber, dan Tahun)	Metode	Hasil
1	Skripsi Sarah Vidia Nafisah berjudul, Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kawasan Kumuh Berbasis Masyarakat Melalui Program Kotaku di Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, tahun 2023	Deskriptif Dengan Pendekatan Kualitatif	Semua proses kolaborasi sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip yang ada. Namun belum ada keterkaitan pada pihak swasta di dalamnya sehingga perlu menggandeng mereka dengan diberi ruang kolaborasi pada Program Kotaku di Kelurahan Gelangan.
2	Jurnal Publisia Muhammad Roisul Basyar dan Anggraeny Puspaningtyas berjudul, Collaborative Governance in CSR Management Program for Slum Area Rehabilitation, tahun 2022	Deskriptif Kualitatif	Kesuksesan pada kolaborasi pemerintahan antara pemerintah, PT. ASTRA, dan komunitas berjalan secara optimal karena mereka dapat berkolaborasi dan pemerintah daerah mendelegasikan sebagian fungsinya kepada PT.ASTRA dan komunitas.

3	Jurnal Citra Widya Edukasi Aang Kuvaini, dkk berjudul, Studi Implementasi Program CSR (Corporate Social Responsibility) Berkelanjutan di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, tahun 2021	Deskriptif Kualitatif	Implementasi program CSR PT. Manakarra Unggul Lestari sudah terlaksana dengan baik di berbagai bidang, namun perlu pemerataan program tersebut ke seluruh wilayah masyarakat.
---	---	--------------------------	---

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari jurnal dan skripsi, 2024

Dari seluruh penelitian terdahulu yang telah dijelaskan dalam tabel, persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kedua penelitian ini membahas tentang kolaborasi pemerintahan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain penelitian ini dilakukan dalam perusahaan yang dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, penelitian ini membutuhkan lebih dari satu bentuk bantuan TJSJL.

Dari persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu serta yang akan diteliti, penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu sehingga peneliti ingin meneliti isu penelitian ini yang berjudul **“Penerapan Prinsip Kolaborasi Pemerintahan dalam Penyaluran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PTPN IV Regional 4”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari seluruh uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini akan difokuskan ke dalam masalah penting yang berkaitan dengan judul penelitian yang diambil, yaitu :

1. Apakah terdapat penerapan prinsip kolaborasi yang dilakukan antara PTPN IV Regional 4 dengan Pemerintah Kota Jambi pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan?
2. Bagaimana kinerja PTPN IV Regional 4 dalam penyebaran TJSL di wilayah Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara penerapan prinsip kolaborasi yang dilakukan antara PTPN IV Regional 4 dengan Pemerintah Kota Jambi pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Untuk mengetahui kinerja PTPN IV Regional 4 dalam penyebaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di wilayah Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian dilihat dalam konteks secara teoritis serta konteks secara praktis. Dengan menggunakan konteks tersebut, manfaat penelitian ini disesuaikan dengan konteks yang ada yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dapat diharapkan hasil penelitian ini memberikan sarana dalam memperluas dan mengembangkan pengetahuan yang sesuai dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan dan sekaligus dijadikan salah satu bahan referensi serta bahan masukan ataupun kajian mengenai Kolaborasi Pemerintahan dan Perusahaan dalam hal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Serta menjadikan penelitian ini sebagai bahan dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, tinjauan ataupun masukan bagi pemerintah serta perusahaan yang meningkatkan kolaborasi antara pemerintahan dengan perusahaan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bentuk ide ataupun solusi baik kepada pemerintah dan perusahaan untuk berinovasi dalam melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah serta perusahaan.

1.5 LANDASAN TEORI

1.5.1 Konsep Kolaborasi Pemerintahan

Pemerintahan menurut Dharma merupakan sekelompok orang yang diberi sesuatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.⁸

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan menggunakan kebijakan dengan melibatkan partisipasi aktor-aktor lain seperti sektor swasta, sektor yang berada di dalam naungan pemerintahan dan lainnya. Maka dari itu, muncullah suatu kolaborasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut.

Menurut Frans & Bursuck, pengertian kolaborasi secara luas adalah gaya atau cara yang dipilih oleh para profesional untuk mencapai tujuan bersama.⁹ Selain itu, menurut Sabaruddin, kolaborasi merupakan kerjasama antar organisasi, atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent.¹⁰

⁸ Agus Dharma, *Manajemen Prestasi Kerja*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), hlm. 32

⁹ Afdal, 'Kolaboratif: Kerangka Kerja Masa Depan', *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol.3 No.2, 2015, hlm. 2

¹⁰ Annisa Aulia Akbar, 'Collaborative Governance untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi di Kota Makasar', *Skripsi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2021, hlm. 8.

Maka dari itu, Ansell dan Gash memberikan pengertian tentang *Collaborative Governance* atau disebut sebagai kolaborasi pemerintahan yaitu :

“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.”¹¹

Bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kolaborasi pemerintahan merupakan suatu pengaturan dalam pemerintahan yang mana satu ataupun lebih pada lembaga publik dengan secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non pemerintahan non-negara dalam melakukan proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi kepada konsensus, dan deliberasi dengan bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau pengelolaan program publik atau aset yang dipunya.

Pada definisi ini, ada enam kriteria penting yang ditekankan : (1) forum diinisiasi oleh lembaga publik atau institusi, (2) partisipasi dalam forum disertakan aktor non-negara, (3) partisipasi terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan sekedar konsultasi dari lembaga publik, (4) forum dilaksanakan secara formal dan bertemu dengan kolektif, (5) forum bertujuan untuk mengambil keputusan secara konsensus (walaupun secara

¹¹ Ansell, Chris dan Gash, Allison, ‘Collaborative Governance in Theory and Practice’, *Journal of Public Administration Research And Theory*, 2007, hlm. 544

praktisnya konsesus tidak tercapai), dan (6) fokus dalam kolaborasi mengarah kepada kebijakan publik atau manajemen publik.

Kolaborasi pemerintah dan kemitraan antara publik-swasta terkadang merujuk pada fenomena yang sama. Kemitraan dalam pemerintah-swasta membutuhkan kolaborasi supaya berfungsi, tetapi tujuan mereka sering kali mencapai koordinasi dibandingkan untuk mencapai pengambilan keputusan konsesus itu sendiri. Kemitraan pemerintah-swasta mungkin mewakili kesepakatan antara aktor publik dan swasta untuk memberikan layanan tertentu atau melakukan tugas tertentu. Oleh karena itu, pengambilan keputusan secara kolektif tidak lagi penting dibandingkan dengan definisi kemitraan publik-swasta. Secara kontras, pelembagaan yang berproses dengan pembuat keputusan secara kolektif merupakan hal penting dalam definisi kolaborasi pemerintahan.

Dapat disimpulkan, kolaborasi pemerintahan merupakan cara pemerintahan melakukan pengaturan dan kerjasama yang melibatkan beberapa aktor-aktor baik dalam aktor swasta, aktor dibawah naungan pemerintahan serta aktor-aktor lainnya dengan aktor serta pemerintah dapat mencapai suatu tujuan bersama.

Menurut Ansell dan Gash, terdapat empat indikator *collaborative governance* yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dan yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini dengan indikator tersebut dibagi menjadi :

a. Kondisi awal

Kolaborasi dapat memfasilitasi ataupun menghambat kerja sama antar pemangku kepentingan dan antara lembaga bila melihat kondisi awal dari situasi tersebut. Salah satu bentuknya adalah ketika pemangku kepentingan mempunyai sejarah perpecahan yang besar dan melaksanakan secara emosional dalam isu-isu yang ada disekitarnya sehingga mengibaratkan musuh sebagai pihak yang tidak bermoral. Selain itu, para pemangku tersebut mempunyai satu visi bersama dalam apa yang ingin mereka capai melalui kolaborasi serta kerja sama di masa lampau dan memiliki rasa saling menghormati. Dari kasus tersebut, tidak mungkin dapat melakukan kolaborasi, akan tetapi, dari kasus pertama diupayakan untuk mengatasi masalah ketidakpercayaan, tidak adanya rasa hormat antara satu sama yang lain dan adanya sifat antagonisme. Maka dari itu, kondisi awal dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

- *Power/resource imbalances* (Ketidakseimbangan daya/sumber daya)

Adanya ketidakseimbangan dalam kekuasaan antar pemangku kepentingan menjadi masalah yang sering terjadi dalam melakukan kolaborasi. Bila para pemangku kepentingan tidak memiliki kapasitas, organisasi, status, sumber daya dalam berpartisipasi, dan partisipasi setara dengan pemangku kepentingan lainnya, maka kolaborasi rentan dimanipulasi oleh pihak yang mempunyai

kekuatan yang lebih besar. Selain itu, ketimpangan kekuasaan menjadi masalah utama ketika para pemangku kepentingan tidak mempunyai struktur organisasi dalam mewakili proses kolaboratif. Maka dari itu, bila terdapat ketidakseimbangan kekuatan/sumber daya yang signifikan antar pemangku kepentingan yang mengakibatkan pemangku kepentingan tidak bisa berpartisipasi dengan berarti, maka perlu tindakan efektif dari hal tersebut.

- *Incentives to participate* (Intensif dalam berpartisipasi)

Dikarenakan partisipasi sebagian besar bersifat sukarela, maka dari itu penting untuk memahami insentif yang dimiliki para pemangku kepentingan dalam ketelibatan pada kolaboratif dan beberapa faktor yang membentuk insentif tersebut. Hal ini mencakup analisis insentif bagi badan-badan publik untuk menjadi sponsor dalam kolaborasi. Ketika pemangku kepentingan dapat meraih tujuan yang dicapai secara sepihak, maka kolaborasi akan berhasil apabila pemangku tersebut merasa adanya saling ketergantungan antar satu dengan yang lain. Selain itu, bila ketergantungan pada forum kolaboratif menjadi tempat eksklusif, maka sponsor harus bersedia melakukan usaha awal dalam mendapatkan forum alternatif (pengadilan, legislator, dan eksekutif) yang saling menghormati dan menghargai hasil dalam proses kolaborasi.

- *Prehistory of antagonism and cooperation* (Prasejarah antagonisme dan kerja sama)

Ketika para pemangku kepentingan mempunyai latar belakang yang bersifat antagonisme ataupun kerja sama, ini akan menghambat atau memfasilitasi dalam kolaborasi. Hal ini dikarenakan kolaborasi terkadang dibangun dengan sejarah dendam yang bersifat antagonisme seperti pada dinamika “kita versus mereka” menjadi salah satu racun dalam keberhasilan sebuah kolaborasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apabila adanya suatu riwayat antagonisme di antara para pemangku kepentingan, maka kolaborasi tidak mencapai yang diraih, namun hal tersebut bisa dihindari apabila terdapat ketergantungan yang sangat tinggi diantara para pemangku kepentingan ataupun adanya diambil langkah-langkah positif untuk memperbaiki tingkat kepercayaan dan modal sosial di antara para pemangku kepentingan.

b. Kepemimpinan fasilitatif

Secara luas, kepemimpinan dipandang sebagai unsur-unsur penting untuk mengajak semua pihak untuk berunding dan mengarahkan mereka melalui masa-masa sulit dalam proses kolaborasi. Hal ini sangatlah penting untuk menetapkan serta mempertahankan aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, menjajaki keuntungan bersama, serta memberdayakan dan mewakili pemangku kepentingan yang lemah. Hal ini menjadi berguna ketika terjadi konflik tinggi dan kepercayaan rendah, namun mempunyai

distribusi kekuasaan relatif seimbang dan pemangku kepentingan juga memiliki insentif untuk berpartisipasi, sehingga kolaborasi dapat berjalan dengan mengandalkan layanan perantara yang jujur dan dapat dipercaya dan diterima oleh masing-masing pemangku kepentingan. Broker jujur ini kemungkinan besar merupakan mediator yang profesional. Broker tersebut dapat mengembangkan kepercayaan dalam proses kolaborasi dengan tetap berada di atas keributan dan menjaga integritas prosedural dan transparansi proses kolaborasi. Tetapi ketika distribusi kekuasaan lebih asimetris atau insentif dalam berpartisipasi lemah atau asimetris, maka kolaborasi mungkin berhasil bila terdapat pemimpin “organik” yang kuat dimana sejak awal mendapat rasa hormat dan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Pemimpin ini merupakan pemimpin yang hadir dari komunitas pemangku kepentingan. Ketersediaan pemimpin-pemimpin tersebut sangat bergantung dari keadaan sekitar tempat tersebut.

c. Desain pada institusi

Desain di sini mengacu dalam protokol dasar dan aturan dasar kolaborasi dimana hal ini sangat penting dalam melegitimasi prosedural proses kolaboratif dengan isu yang paling dasar berasal dari akses terhadap proses kolaborasi itu sendiri. Desain ini perlu diikutsertakan pada keterbukaan dan inklusif, karena hanya kelompok yang mempunyai kesempatan yang valid dalam berpartisipasi akan mengembangkan komitmen terhadap proses. Selain itu, desain ini perlu

dilihat partisipasinya. Partisipasi yang luas bisa ditolerir, namun partisipasi ini harus diupayakan secara berkala. Rancangan fitur pada desain yang penting dimiliki adalah inklusivitas berkaitan erat dengan eksklusivitas forum kolaboratif, aturan-aturan dasar yang jelas, transparansi proses, dan penggunaan tenggat waktu.

d. Proses kolaborasi

Model dalam proses kolaborasi terkadang menggambarkan kolaborasi sebagai pengembangan bertahap. Namun proses kolaborasi mempunyai sifat siklus daripada linier yang mengakibatkan interaksi yang dilakukan secara nonlinier. Dikarenakan komunikasi merupakan inti dari sebuah kolaborasi, maka proses kolaborasi dapat dilakukan sebagai berikut :

- *Face to face dialogue* (dialog secara tatap muka)

Pada tahap ini, seluruh aktor-aktor yang terlibat diharapkan untuk membangun kepercayaan, menghormati antara satu pihak dengan pihak lainnya, pemahaman bersama, serta komitmen dari proses kolaborasi yang telah direncanakan dan dilakukan. Dialog tatap muka ini merupakan tahapan paling awal yang paling penting dalam kolaborasi. Bila tidak adanya dialog tersebut, ditakutkan akan memunculkan konflik dalam berjalannya proses kolaborasi.

- *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Kepercayaan adalah hal yang sangat penting dalam kolaborasi, dikarenakan kolaborasi bukan sekedar tawar-menawar, melainkan

menitikberatkan pada membangun kepercayaan di setiap aktor-aktor yang terlibat. Kepercayaan ini tidak akan didapatkan dengan cepat, melainkan kepercayaan memerlukan waktu yang lama. Sehingga hal ini akan berguna dalam jangka waktu yang panjang dalam proses kolaborasi.

- *Commitment to The Process* (komitmen terhadap proses)

Cara-cara dalam mengembangkan keyakinan bahwa perundingan merupakan salah satu bentuk yang terbaik dalam mencapai satu kebijakan yang difavoritkan dalam memecahkan suatu permasalahan yang telah terjadi. Secara praktis, komitmen memerlukan tahapan-tahapan yang jelas, adil, transparan di setiap aktor yang terlibat.

- *Shared Understanding* (saling memahami)

Dalam satu titik tertentu, aktor-aktor dalam proses ini membutuhkan perkembangan dalam proses pemahaman bersama yang dicapai secara kolektif. Pemahaman ini juga dapat diartikan sebagai penyatuan pemahaman atas pengetahuan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

- *Intermediate Outcome* (hasil akhir yang telah dicapai)

Tahap ini memunculkan kesepakatan dari setiap hasil akhir yang perlu diselesaikan dalam kolaborasi. Perancangan serta persetujuan hasil akhir ini dapat memberikan kepercayaan dan komitmen

dalam melaksanakan tugas pokok yang diperlukan oleh aktor-aktor dalam permasalahan yang terjadi.¹²

1.5.2 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/*Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan perusahaan (sesuai dengan kemampuannya) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat/lingkungan dimana ia berada. Contoh bentuk tanggung jawab mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan umum dan lingkungan, menyediakan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, hingga menyumbangkan fasilitas desa/masyarakat untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat. Yang membantu adalah masyarakat sekitar perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah mekanisme yang melampaui tanggung jawab hukum organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan masalah lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan pemangku kepentingan.¹³ CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diyakini dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, karena investor cenderung

¹² *Ibid*, hlm. 550-561.

¹³ Azwir Nasir dkk, 'Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, Profitabilitas, Ukuran, dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bei', *Jurnal Ekonomi*, Volume 21 Nomor 4, 2013, hlm. 2.

berinvestasi pada perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan informasi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu keunggulan kompetitifnya.

Definisi paling awal dari CSR didefinisikan dalam "Tanggung Jawab Sosial Bisnis" Howard R. Bowen. CSR adalah tanggung jawab pengusaha yang berusaha menunjukkan nilai sosial. Johnson dan Johnson, sejalan dengan Konferensi Amerika tentang CSR, mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai cara perusahaan mengelola proses bisnis mereka untuk memiliki dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Definisi ini secara radikal berangkat dari filosofi bagaimana menjalankan bisnis yang berdampak positif secara keseluruhan atau sebagian terhadap bisnis dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola operasinya dengan memproduksi produk yang positif secara sosial dan lingkungan.

Perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan akan melaporkan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya selain laporan keuangan tahunannya. Hal ini dikarenakan perusahaan menginginkan legitimasi dan nilai positif dari masyarakat agar dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang.¹⁴ Menurut Kartini, terdapat 8 indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu :¹⁵

¹⁴ Erryzka Yudipermatasari, 'Realisasi Pembelajaran Corporate Social Responsibility Perusahaan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2019', *JIKEM*, No.2, 2021, hlm.2.

¹⁵ Kartini, Dwi, *Corporate Social Responsibility*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm.54.

a. *Leadership* (Kepemimpinan)

Dukungan dari petinggi direksi perusahaan serta kesadaran filantropik dari pimpinan menjadi faktor utama dalam keberhasilan TJSL.

b. Proposi Bantuan

Perancangan anggaran perlu diserap secara maksimal, dalam hal ini bila area yang dilakukan luas, maka anggaran yang diperlukan harus besar.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

Terdapat laporan tahunan perusahaan serta mekanisme audit sosial dan finansial dengan audit ini dikaitkan dalam sejauh mana program TJSL ini ditujukan kepada kebutuhan masyarakat, perusahaan serta mendapat umpan balik dari masyarakat dengan melakukan wawancara kepada penerima manfaat.

d. Cakupan Wilayah

Adanya skala prioritas yang diperlukan secara tertib dan rasional terhadap penerima manfaat.

e. Perencanaan serta mekanisme monitoring dan evaluasi

Terdapat jaminan dalam melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk merencanakan dalam siklus pelaksanaan proyek serta kesadaran dalam memperhatikan aspek lokalitas yang mana adanya kontribusi, pemahaman, serta penerimaan kepada budaya-budaya lokal yang tersedia. Selain itu, dalam point ini perlu adanya cetak biru kebijakan yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan program.

f. Pelibatan Pemegang Saham

Perlunya koordinasi reguler dari pemegang saham kepada masyarakat dan jaminan partisipasi masyarakat untuk terjun langsung kedalam proyek yang sedang berjalan.

g. Keberlanjutan

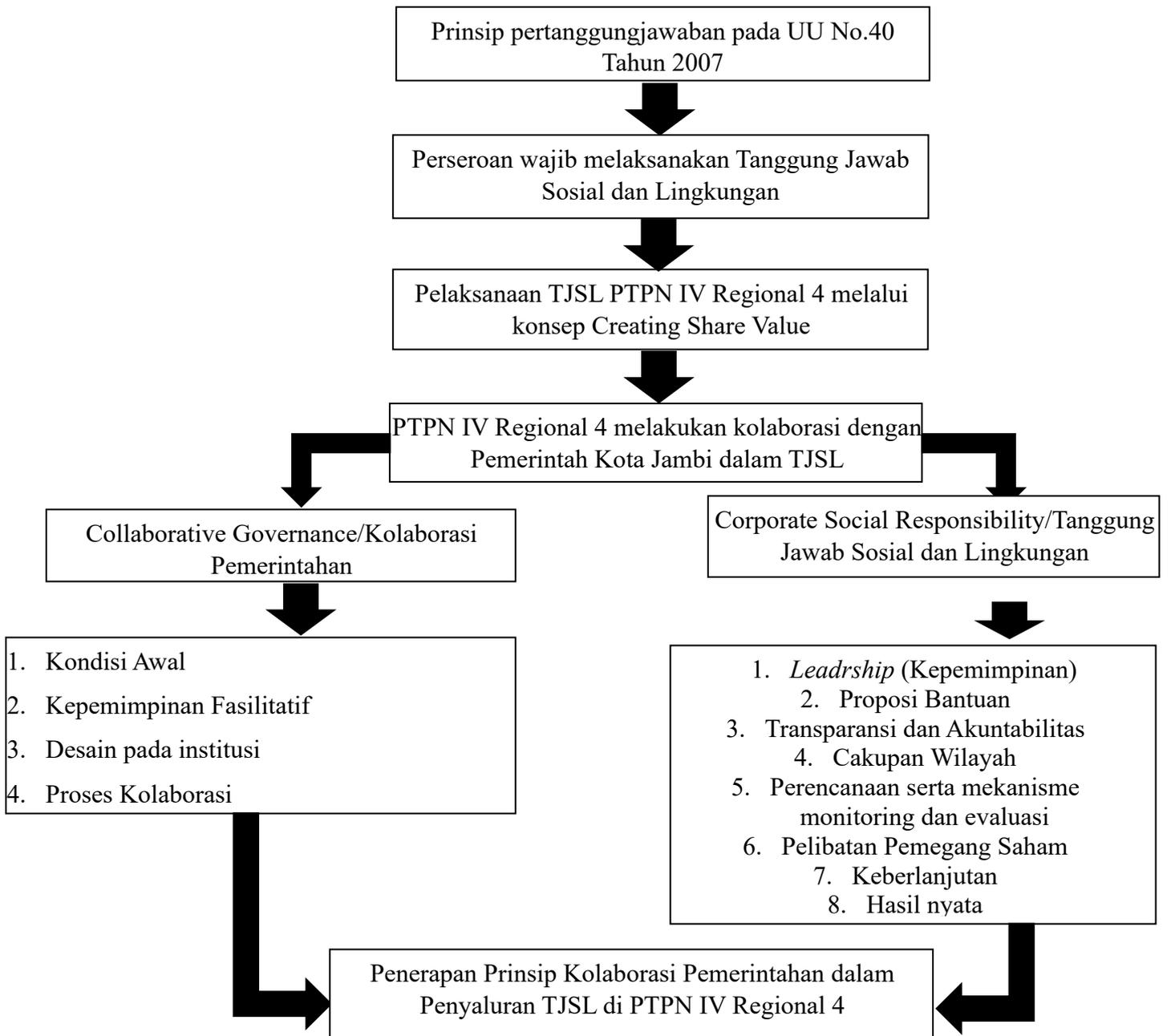
Diharapkan adanya tumbuh rasa memiliki program serta hasilnya dalam diri masyarakat, sehingga terjadinya ambil alih peran dari korporat ke masyarakat dan perusahaan perlu memilih partner program yang dapat menjamin program ini dapat selesai.

h. Hasil nyata

Diharapkan adanya dampak dalam hal ekonomi serta pola pikir pada masyarakat. Selain itu, perlu adanya dokumentasi hasil yang dapat menunjukkan parameter yang sesuai bidang TJSL dalam perusahaan tersebut.

1.6 Kerangka Berpikir

Dari seluruh data yang telah ada, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.7 METODE PENELITIAN

1.7.1 Jenis Penelitian

Pada bagian ini, penulis mengambil jenis penelitian bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomenan sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dan pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹⁶

Oleh karena itu, jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang mana penelitian ini untuk menemukan sebuah pengetahuan ataupun teori dalam waktu yang tertentu.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana terjadinya suatu kejadian yang layak untuk dilakukan oleh penelitian dimana peneliti akan mendapatkan keadaan yang sebenarnya sehingga mendapatkan data-data dan informasi dari objek yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Perseroan Terbatas Perkebunan Negara IV Regional 4 Jambi. Hal ini setiap kegiatan TJSL yang dilakukan PTPN IV Regional 4 dari seluruh daerah regional perusahaan dilaporkan dan dibukukan semua ke kantor pusat PTPN IV Regional 4 pada bagian sekretariat perusahaan dan umum.

1.7.3 Fokus Penelitian

¹⁶ Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 11.

Fokus penelitian merupakan pembatasan studi dalam penelitian untuk mencapai tujuan dari penelitian kualitatif yang mana pada dasarnya untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Fokus Penelitian ini berarti bahwa tujuan penelitian kualitatif tidak boleh menunjukkan dua atau lebih variabel yang saling berelasi atau justru membandingkan dua atau lebih kategori tertentu¹⁷.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan pada penerapan prinsip kolaborasi pemerintah dalam penyaluran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PTPN IV Regional 4. Peneliti mencoba mengkaji dalam sudut pandang usaha yang dilakukan PTPN IV Regional 4 dalam menerapkan kolaborasi pemerintah dengan Pemerintah Kota Jambi pada penyaluran TJSL PTPN IV Regional 4.

1.7.4 Sumber Data

Pada bagian sumber data, data yang diperoleh dari penelitian ini dapat diperoleh dari :

a. Data Primer

Data ini dapat diperoleh dengan cara turun langsung ke lapangan yang mana pada penelitian ini sumber data primer yang ditetapkan adalah dengan observasi dan wawancara mengenai penerapan prinsip kolaborasi pemerintah dalam penyaluran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PTPN IV Regional 4.

¹⁷ Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006 , Hlm. 6

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak dapat diperoleh dari sumber pertama.¹⁸ Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber referensi, yang berupa dokumen-dokumen, buku ataupun jurnal, makalah serta hasil penelitian yang relevan.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Pada teknik penentuan informan, penelitian ini menggunakan metode yang digunakan kualitatif dalam menentukan siapa saja yang menjadi sumber data informan. Dikarenakan penelitian kualitatif tidak memakai sampel, maka informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan para informan terhadap objek yang akan diteliti.

Pada penelitian ini, teknik sampling yang akan digunakan adalah purposive sampling yang mana teknik pengambilan sampel sumber data dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada. Pertimbangan ini didasarkan dari sampel yang mana informan tersebut mempunyai informasi yang lebih luas dan mendalam serta tidak menutup kemungkinan pada penelitian ini, peneliti akan menambahkan beberapa informan yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian ini.

Dengan menggunakan metode ini, informan yang akan diteliti oleh peneliti yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut beserta alasannya :

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 159

- a. Perwakilan dari Pemerintah Kota Jambi, yang berperan dalam kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan.
- b. Direktur PTPN IV Regional 4 yang mana merupakan pimpinan teratas dalam perusahaan sekaligus informan pertama dalam penelitian ini.
- c. Kepala bagian sekretariat perusahaan dan umum PTPN IV Regional 4 yang mana merupakan informan kedua dalam penelitian ini.
- d. Kepala sub-bidang urusan TJSL PTPN IV Regional 4 yang mana merupakan informan ketiga dalam penelitian ini.
- e. Pegawai bagian sekretariat perusahaan dan umum PTPN IV Regional 4 yang membidangi TJSL PTPN IV Regional 4 yang mana merupakan informan keempat dalam penelitian ini.
- f. Masyarakat penerima bantuan TJSL PTPN IV Regional 4 yang mana merupakan informan tambahan yang digunakan untuk memvalidasi kebenaran penelitian ini.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini akan melakukan observasi, wawancara, serta kepustakaan/dokumen. Ketiga hal ini sangat penting dilakukan untuk mencari informasi dan mendapatkan bukti data dalam penelitian. Penjelasan dari pilihan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Observasi

Observasi merupakan salah satu kegiatan pengamatan dalam pemuatan perhatian semua objek yang menggunakan seluruh panca indera.¹⁹ Pada penelitian ini, observasi digunakan untuk melihat situasi langsung di lapangan penelitian yaitu Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Regional 4 dan mitra-mitra penerima TJSL serta bagian pemerintahan yang menjadi partner kolaborasi TJSL tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk perjumpaan antara dua orang untuk bertukar sebuah informasi ataupun ide yang dapat melalui tanya jawab, sehingga dapat diolah menjadi suatu makna dari setiap topik tertentu. Dalam hal ini, ada beberapa macam bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, serta tidak terstruktur.²⁰

Jenis wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu wawancara semi terstruktur yang termasuk dalam kategori in-depth interview. Wawancara semiterstruktur merupakan jenis wawancara yang dilakukan secara lebih bebas dengan tujuan agar proses wawancara dilakukan secara fleksibel.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik data yang dilakukan untuk menyatukan dokumen-dokumen relevan dan dapat dikaitkan dengan masalah dari penelitian ini. Bentuk dari dokumen ini dapat berupa

¹⁹ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 234

²⁰ Moleong, Lexy J. *Op.cit.*, hlm. 186

²¹ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 119.

dokumen-dokumen yang berasal dari pemerintahan, hasil penelitian terdahulu, foto ataupun video, buku harian, dan lain sebagainya.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan pada saat ini akan dilakukan dengan memakai teknik analisis data kualitatif. Menurut Moleong yang dimaksud analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²² Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis data kualitatif. Adapun model analisis data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis model interaktif sebagai berikut :

- a. Miles dan Huberman mendefinisikan bahwa reduksi data merupakan serangkaian proses dimulai dengan pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang masih kasar yang merupakan hasil dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan. Jadi reduksi data dapat didefinisikan sebagai proses merangkum dan melakukan penyederhanaan data-data yang diperoleh dari lapangan agar lebih mudah untuk dipahami. Reduksi data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk dilakukan, karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak dan kompleks. Dengan

²² *Ibid*, hlm. 145.

melakukan reduksi data, maka data yang telah dikumpulkan akan lebih sederhana dan jelas. Langkah dalam melakukan reduksi data yaitu mengidentifikasi satuan (unit), melakukan proses koding (memberikan kode untuk setiap unit), melakukan kategorisasi, mensintesis data, dan menyusun hipotesis.

- b. Penyajian Data Setelah melakukan reduksi data, maka tahap selanjutnya dari analisis data, yaitu penyajian data. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang penyajian datanya berupa grafik, tabel, pie chart dan sebagainya. Maka dalam penelitian kualitatif data disajikan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Berkaitan dengan hal tersebut Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dalam menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi Dalam penelitian kualitatif kesimpulan yang dihasilkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Setelah data di reduksi atau dirangkum dan kemudian disajikan, maka langkah berikutnya, yaitu melakukan penarikan kesimpulan. Proses verifikasi dalam hal ini adalah melakukan peninjauan ulang terhadap data yang diperoleh dari lapangan.

1.7.8 Keabsahan Data

Keabsahan atau triangulasi menurut Wiliam Wiersman ialah dalam pengujian kreadibilitas data, triangulasi berarti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.²³ Jadi, triangulasi adalah metode yang dilakukan untuk mengecek kebenaran suatu data melalui penggunaan metode yang bervariasi.

Tujuan triangulasi data, yaitu sebagai upaya menggabungkan atas campuran metode yang berbeda dalam studi penelitian. Menurut Fielding dan Fielding yang dikutip oleh Eny Winaryati bahwa tujuan peneliti menggunakan triangulasi, yaitu dengan maksud meningkatkan kedalaman dan pemahaman tentang fenomena yang sedang diteliti dengan cara menggabungkan beberapa metode dan teori, karena fenomena yang diselidiki memiliki sedikit dasar teori.²⁴

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, triangulasi yang akan digunakan yaitu triangulasi sumber data, yaitu mengecek kebenaran data atau informasi dengan menggunakan berbagai jenis teknik pengumpulan dan sumber data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 189-191.

²⁴ Eny Winaryati, Action Research dalam Pendidikan, (Semarang: UNIMUS PRESS, 2017). Hlm 126.